

Seminar Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Malnutrisi di Indonesia

Menyadari bahwa malnutrisi merupakan salah satu masalah mendasar dalam kesehatan yang sangat menentukan tingkat kesehatan ibu-anak, Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS) bekerjasama dengan ExxonMobil Oil Indonesia menyelenggarakan seminar 'Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Malnutrisi di Indonesia' pada tanggal 15 Februari 2007 lalu. Seminar yang diselenggarakan di Hotel Bumi Karsa-Bidakara ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, akademisi, LSM, media hingga masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Eksekutif KuIS, Firman Lubis, menyatakan perlunya upaya melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan berbagai pihak, termasuk masyarakat, tentang masalah malnutrisi. Ia menambahkan bahwa kemitraan sangatlah diperlukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia, dan penyelenggaraan seminar tersebut merupakan salah satu upaya KuIS menggalang kerjasama dengan berbagai sektor. Peter Colleman, Direktur ExxonMobil Oil Indonesia menyatakan komitmen untuk meningkatkan pembangunan SDM di Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan. Melalui seminar ini ExxonMobil Oil berharap masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, memiliki derajat kesehatan yang lebih layak melalui pemberian nutrisi yang cukup.

Seminar dibuka dengan Diskusi Paripurna yang menghadirkan dua narasumber yang mewakili berbagai sektor pemerintahan, dengan moderator Tini Hadad. Membawakan materi presentasi bertema *Perspektif Negara Terhadap Penanganan Gizi dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia*, H.M.Sukawati Abubakar, Deputi II Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, memaparkan bahwa kualitas SDM Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Rendahnya kualitas SDM tersebut sangat terkait dengan kurangnya pemenuhan gizi, yang sangat terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan. Karena itu, menurutnya masalah pendidikan dan kemiskinan harus menjadi poin utama intervensi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani gizi buruk antara lain adalah penyusunan UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, upaya memfokuskan pembangunan SDM, dan tersusunnya rencana aksi nasional mengenai Pemenuhan Hak atas Pangan, Pemenuhan Hak Dasar atas Kesehatan, Pemenuhan Hak atas Pendidikan, Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman, serta Penguatan Wawasan Kebangsaan, Kebudayaan, Keagamaan, dan Etika Politik dan Pemerintahan.

DR. Minarto, MPS, yang mewakili Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Departemen Kesehatan RI, memaparkan data-data mengenai prevalensi gizi kurang di Kabupaten/Kota di Indonesia, serta kaitan antara gizi buruk dengan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita. Ia memaparkan bahwa dalam periode 2004 – 2009, pemerintah telah dan akan mengimplementasikan program untuk menurunkan angka prevalensi gizi kurang hingga maksimal 20% dan gizi buruk hingga maksimal 5%. Salah satu strategi utama Departemen Kesehatan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat, yang dalam tataran praktis dilakukan antara lain dengan mengembalikan fungsi Posyandu, meningkatkan kemampuan dan keterampilan provider kesehatan di Puskesmas, suplementasi zat gizi mikro, serta mewujudkan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) melalui advokasi dan sosialisasi dengan penyebaran materi KIE.

Usai diskusi paripurna, seminar dilanjutkan dengan sesi diskusi paralel dengan tiga topik: Cara Mudah dan Murah Mencukupi Gizi Keluarga, Solusi Masalah Malnutrisi dari Perspektif Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Mencari Model Komunikasi dan Edukasi Gizi (RA)